

Beberapa Temuan Awal

**Meretas Jejak Kekerasan
Terhadap Perempuan Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam:
Pola Pengucilan, Pengabaian,
Tantangan dan Implikasinya**

SEBUAH TAWARAN DIALOG

Jakarta, 24 Nopember 2008

KOMNAS PEREMPUAN



Atas: Naususu, Salah satu gunung batu sebagai sumber air bagi pulau Timor.

Kanan: Permukiman bagi Masyarakat adat Kasepuhan



Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 C ayat 2 UUD 1945

BAB I. PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen yang merupakan mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia, dibentuk oleh masyarakat untuk menuntut tanggung jawab negara atas peristiwa pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kerusuhan massal dan penyerangan seksual terhadap perempuan yang terjadi pada bulan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya.

Institusi ini mendapat pengakuan dari negara melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 tahun 2005. Selain Perpres di atas, Komnas Perempuan juga bersandar kepada Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, UU no. 7 thn. 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Deklarasi Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, UU No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Prinsip - prinsip Paris.

Sebagai bagian dari gerakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan bekerja untuk kepentingan para perempuan korban kekerasan, kelompok rentan kekerasan, dan pembela hak-hak perempuan. Baik perempuan Indonesia, perempuan Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, maupun perempuan asing yang hidup di Indonesia. Secara khusus, konstituen Komnas Perempuan adalah perempuan korban dan perempuan yang berpotensi menjadi korban yang semuanya telah mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-haknya di wilayah hukum Indonesia.

Komnas Perempuan meyakini bahwa hak asasi manusia dan kebebasan mendasar adalah hak setiap orang tanpa kecuali yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun. Sesuai dengan Deklarasi Wina 1993, kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan martabat dan nilai kemanusiaan sehingga merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, maka **visi** Komnas Perempuan adalah:

... terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Konflik sumberdaya alam dan perempuan

Sesuai dengan mandatnya, Komnas Perempuan telah menjalankan pemantauan situasi HAM perempuan untuk kasus-kasus yang bersifat politis dalam konflik sumberdaya alam (SDA), konflik sosial dan buruh migran, konflik berbasis keagamaan dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan konflik sumberdaya alam Komnas Perempuan sejak tahun 2003 telah menerima pengaduan berkaitan dengan kasus SDA, antara lain Dampak Pencemaran Teluk Buyat di Sulawesi Utara terhadap perempuan, Kriminalisasi terhadap aktivis perempuan di Soe dan Pembabatan pohon kopi di Manggarai - NTT, Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Bojong dan kekerasan terhadap perempuan (KTP) dalam Reclaiming lahan oleh Petani Pematang Siantar. Sedangkan dua kasus terbaru yang berkaitan dengan sumberdaya alam dua tahun terakhir ini adalah kasus Alastlogo, Pasuruan dan kasus Lumpur Lapindo, Sidoarjo.

Namun dari sedemikian banyaknya konflik sumberdaya alam tersebut perempuan hampir selalu luput dari perhatian atau nyaris tidak ada - bahkan bisa dikatakan tidak ada-- identifikasi kekerasan berbasis jender dalam setiap kelas sosial, baik dalam konteks pemecahan masalah hingga upaya pemulihan, akibatnya pengungkapan kekerasan yang dialami perempuan juga luput dari upaya penyelesaiannya, padahal perempuan adalah kelompok paling rentan ketika konflik sumberdaya alam terjadi.

Komnas Perempuan juga mengidentifikasi belum terdapat kepekaan untuk melihat persoalan perempuan dalam isu sumberdaya alam, sehingga fakta dan penegakan hak asasi perempuan dalam isu tersebut sering terabaikan. Subordinasi masalah perempuan yang dianggap sepele dibanding persoalan sumberdaya alam, dan anggapan jika masalah sumberdaya alam terselesaikan otomatis masalah perempuan akan terselesaikan dengan sendirinya. Aktivitas gerakan perempuan masih dianggap parsial hanya memahami isu kekerasan terhadap perempuan tapi belum berhasil menyambungkan dengan isu sumberdaya alam, juga minimnya analisa struktural dari gerakan perempuan sehingga fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan hanya dilihat sebagai fenomena tunggal yang tidak terkait dengan kondisi struktural dan kultural dimana perempuan tersebut berada.

Maka dalam konteks tersebut tawaran dialog tentang pemetaan kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam ini lahir. Dialog ini adalah langkah awal untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk bersuara. Dokumentasi ini juga diharapkan bisa menjadi alat dialog antar gerakan perempuan dengan gerakan lingkungan pada khususnya dan gerakan sosial pada umumnya.

Proses pemetaan

Proses pemetaan dilaksanakan dalam waktu enam bulan terhitung semenjak Bulan Juni 2008 dan akan berakhir pada November 2008 ini. Untuk memenuhi kebutuhan akan pemetaan yang menyeluruh dan holistik serta agar dapat menjadi alat dialog kepada semua pihak maka pemetaan ini melibatkan peneliti dari beberapa organisasi lingkungan di Indonesia, sehingga laporan ini diharapkan menjadi laporan bersama para pihak yang menekuninya.

Laporan ini dikategorikan sebagai pemetaan mengingat beberapa hal berikut: a) substansi tentang kekerasan berbasis jender dalam pengelolaan sumberdaya alam belum banyak digali di Indonesia; b) metode tutur perempuan merupakan metode yang belum banyak diterapkan dalam merekam rangkaian kisah para perempuan, yang selain ruang hidupnya dihancurkan oleh eksploitasi sumberdaya alam oleh berbagai pihak juga mengalami rangkaian kekerasan di dalam relasi personal, komunitas, dan di dalam lingkup Negara.

Proses tersebut mencakup beberapa kegiatan antara lain 1) serangkaian *focus group discussion* (FGD) dan lokakarya untuk menentukan konsep, metodologi penelitian dan kerangka analisa laporan, 2) pengumpulan data pemetaan dan 3) lokakarya konsolidasi data tengah dan akhir program serta penyusunan analisis dan finalisasi laporan untuk menyempurnakan laporan ini.

Di dalam penulisan hasil riset, para perempuan dan kelompok marjinal lainnya memiliki "ruang" di mana rangkaian kisah yang mereka tuturkan tidak ditampilkan sekedar sebagai data yang akan dianalisis, tapi menjadi bagian utama dari dokumen laporan riset. Beberapa pelaku riset feminis bahkan menggunakan pendekatan orang pertama (*first person*) dalam menampilkan kisah-kisah yang dituturkan. Langkah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan "ruang" di

mana para perempuan penutur dapat menyuarakan masalah yang dihadapi dan strategi bertahan yang mereka kembangkan.

Subyek Pemetaan ini adalah delapan kelompok perempuan, yaitu 1) perempuan tani; 2) perempuan nelayan; 3) perempuan adat; 4) perempuan penggerak perlawanan terhadap tambang; 5) perempuan buruh perkebunan; 6) perempuan sawit; 7) perempuan korban bencana ekologis; dan 8) perempuan marjinal kampung kota.

Perempuan tani yang menjadi subyek pemetaan kali ini adalah para perempuan tani yang tinggal di Desa Ketajek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, yang mengalami rangkaian kekerasan akibat konflik agraria dengan perkebunan dan terus berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dan keluarganya.

Perempuan nelayan subyek pemetaan ini adalah perempuan nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara yang ruang hidupnya diambil alih oleh Pantai Cermin Theme Park & Resort (PCTPR) yang dalam proses pembangunannya melibatkan investor dari Malaysia.



Untuk **perempuan buruh perkebunan**, pemetaan kali ini melibatkan perempuan buruh perkebunan teh PT. Pagilaran. Wilayah perkebunan yang dikuasai perusahaan ini berlokasi di lereng pegunungan Kemuylan, sebelah utara pegunungan Dieng ± 36 Km tenggara kota Batang, tepatnya di dusun Pagilaran, desa Keteleng, kecamatan Blado, kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah.

Perempuan adat yang dijadikan subyek penelitian kali ini adalah perempuan Kasepuhan Banten Kidul yang tinggal di sebuah desa di kawasan ekosistem Halimun yang terletak di Kabupaten Lebak, Propinsi Banten.

Perempuan penggerak perlawanan terhadap tambang yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah Perempuan Molo yang tinggal di kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi subyek pemetaan kali ini yang tidak saja mewakili korban pertambangan tapi juga mewakili kelompok perempuan adat yang menjadi penggerak aksi-aksi perlawanan terhadap pertambangan marmer.

Perempuan sawit yang dipilih sebagai subyek pemetaan kali ini adalah perempuan Dayak Hibun yang terlibat dalam kegiatan perkebunan besar kelapa sawit di dusun Sanjan Eras, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat.

Perempuan korban bencana Lapindo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi pengungsi bencana ekologis merupakan subyek pemetaan yang mewakili korban bencana ekologis.

Untuk **perempuan kampung kota**¹, perekam tutur menggali dan merekam kisah-kisah para perempuan marjinal yang tinggal di sekitar sungai Ciliwung di kelurahan kwitang, kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

¹ Istilah kampung-kota dipirih sebagai padanan miskin kota (*urban poor*)

Pada proses awal pengembangan gagasan tentang pemetaan tentang kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dalam pengelolaan sumberdaya alam, sebuah tim kecil yang kemudian menjadi komite pengarah (*steering committee*) mengeksplorasi beberapa pemikiran yang dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam seluruh rangkaian penyusunan tulisan ini, termasuk penentuan kelompok perempuan mana saja yang akan dikaji. Setelah melalui beberapa rangkaian diskusi, tim kecil memutuskan untuk menerapkan ekologi politik feminis (*feminist political ecology*) dan riset feminis sebagai kerangka pendekatan.

Pada tahap lokakarya konsolidasi data tengah dan akhir program, proses penelitian di lapangan direfleksikan untuk melihat sejauh mana penelitian sudah berlangsung sejauh mana metodologi dapat diaplikasikan di lapangan. Lokakarya konsolidasi data akhir program dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan data hasil penelitian akhir dan menyusun sistematika penulisan laporan.

Mengapa memilih ekologi politik feminis?

Ekologi politik feminis merupakan pengembangan dari pendekatan ekologi politik. Pendekatan ekologi politik digunakan untuk mengkaji aspek politik, ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab utama degradasi lingkungan dan kekayaan alam (Blaikie and Brookfield, 1987). Dalam pendekatan ekologi politik, perubahan-perubahan lansekap alam di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan ekonomi politik yang lebih luas (Blaikie dan Brookfield 1987, Peet dan Watts 1996, 2004).

Ekologi politik feminis merupakan kerangka teori yang melihat aspek pengetahuan, hak atas kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aspek akses dan kontrol, serta aspek institusi pengurusan kekayaan alam dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dari perspektif gender, kelas, etnisitas, dan aspek-aspek lain (Rocheleau, Thomas-Slayter, Wangari 1996).

Tim penulis laporan ini memilih ekologi politik feminis sebagai pisau analisis karena pendekatan ini membuka peluang untuk melihat relasi kekuasaan dalam masyarakat yang dipengaruhi gender, kelas, etnisitas, agama, dan aspek-aspek lain. Pendekatan ini juga mengakui bahwa perempuan bukan entitas homogen dan bahwa perempuan memiliki kompleksitas posisi, fungsi, dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perbedaan kelas, etnisitas, dan hal-hal lainnya, sehingga pengalaman dan reaksi perempuan terhadap satu isu akan berbeda dengan perempuan lainnya.

Ekologi politik feminis melihat kekerasan terhadap perempuan berbasis gender disebabkan oleh penguasaan sumberdaya alam oleh para pihak yang memiliki kekuasaan, terutama negara dan pasar. Proses penghancuran sumberdaya alam telah menciptakan rangkaian kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dalam relasi personal, dalam komunitas, didalam lingkup negara, dan terkait erat dengan agresi modal besar. Selanjutnya, ekologi politik feminis melihat bahwa seluruh rangkaian kekerasan tersebut terjadi karena penghancuran sumberdaya alam telah mengakibatkan hancurnya pengetahuan perempuan, hilangnya hak perempuan atas sumberdaya alam, lemahnya organisasi² perempuan di tingkat akar rumput. Lebih jauh, ekologi politik feminis melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender di dalam pengelolaan sumberdaya alam terkait erat dengan aspek kelas, etnisitas, ruang hidup perempuan yang dipengaruhi oleh aspek geopolitik³ dan geokultural⁴, dan aspek lainnya.

² Dalam kerangka ekologi politik feminis, yang dimaksudkan sebagai organisasi meliputi organisasi informal dan jaringan solidaritas antar perempuan di dalam komunitasnya.

³ Pembagian bentang alam berdasarkan keputusan politik oleh penyelenggara negara, misalnya penetapan wilayah-

Mengapa memilih pendekatan riset feminis dan metode tutur perempuan?

Riset feminis merupakan kajian yang bertujuan memahami situasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan kaum marjinal lainnya dengan menempatkan mereka bukan sebagai obyek kajian melainkan sebagai subyek kajian. Riset feminis merupakan kajian yang berpihak, di mana pelaku riset memiliki keberpihakan kepada perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Riset feminis juga bertujuan untuk menggali informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan upaya-upaya yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya yang selama ini mengalami subordinasi dan opresi.

Salah satu metode dalam kerangka riset feminis adalah tutur perempuan. Metode ini berisi proses menggali, mendengar dan merekam kisah-kisah perempuan dari para perempuan itu sendiri yang berkaitan dengan narasi besar dari peristiwa tertentu. Bagi metode tutur perempuan, kisah-kisah yang diceritakan oleh perempuan dianggap sebagai informasi penting. Lebih jauh, langkah untuk merekam kisah-kisah perempuan merupakan upaya mendekonstruksi pemahaman yang memposisikan pengalaman perempuan bukan sebagai pengetahuan.

Kisah-kisah yang dituturkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman personal masing-masing penutur. Rangkaian tutur tersebut tidak hanya akan melengkapi narasi besar dari peristiwa tertentu (misalnya peristiwa diambilalihnya ruang hidup perempuan oleh perusahaan pertambangan, baik pertambangan mineral maupun “penambangan kayu” (baca: pemegang Hak Pengusahaan Hutan/HPH), tapi justru akan menjadi sebuah narasi tersendiri yang dapat Membeberikan gambaran tentang kekerasan yang dihadapi oleh para perempuan penutur sekaligus strategi bertahan yang mereka kembangkan.

Didalam penulisan hasil riset, para perempuan dan kelompok marjinal lainnya memiliki “ruang” di mana rangkaian kisah yang mereka tuturkan tidak ditampilkan sekedar sebagai data yang akan dianalisis, tapi menjadi bagian utama dari dokumen laporan riset. Beberapa pelaku riset feminis bahkan menggunakan pendekatan orang pertama (*first person*) dalam menampilkan kisah-kisah yang dituturkan. Langkah tersebut merupakan upaya untuk menciptakan “ruang” di mana para perempuan penutur dapat menyuarakan masalah yang dihadapi dan strategi bertahan yang mereka kembangkan.



Perempuan petani di Ketajek.
Pendekatan Ekologi Politik Feminis mampu melihat lapis kekerasan yang ia alami.

Pandangan mengenai gerakan sosial, gerakan perempuan dan gerakan lingkungan

Gerakan sosial adalah sebuah aksi kolektif yang ditujukan untuk melakukan perubahan dan pembentukan tatanan masyarakat baru yang lebih adil. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak terkecuali Indonesia, memerlukan pendefinisian terus-menerus mengenai keadilan. Petani didataran Eropa menuntut adanya perubahan dalam sistem feodal pada abad ke-18, lalu dipimpin oleh gerakan buruh pada masa kapitalisme industri, hingga sampai pada gerakan sosial

wilayah administrasi dalam Negara (propinsi, kabupaten, kecamatan, desa).

⁴ Penentuan bentang alam yang merupakan ruang hidup komunitas berdasarkan pengambilan keputusan yang diambil sendiri oleh komunitas yang dipengaruhi oleh aspek sosial budaya. Misalnya penentuan ruang hidup masyarakat adat.

baru yang muncul pada tahun 1960an. Gerakan sosial baru muncul sebagai bentuk ketidakpuasan dan kritik terhadap kapitalisme yang melaju pesat.

Gerakan yang pada awalnya didorong oleh kaum pelajar ini mendasarkan gerakannya pada hak asasi manusia, seperti perjuangan kebebasan sipil, pengembangan demokrasi secara luas, penyelamatan manusia dan lingkungan dari kerusakan sebagai dampak industrialisasi.

Pada 1920-an untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, perempuan bergerak di sekitar kepentingan jender mereka. Mereka mengambil bentuk masalah sosio-kultural perempuan, dan mengorganisir diri di atas dasar keagamaan dan daerah serta gerakan politik yang penting saat itu. Berbagai sekolah perempuan didirikan dan sejumlah majalah diterbitkan⁵.

Organisasi formal perempuan pertama yang berdiri yakni Putri Mardika, didirikan di Jakarta tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan lebih tampil di depan umum, mengangkat perempuan ke kedudukan setara dengan laki-laki. Antara tahun 1913-1915 berdiri berbagai organisasi perempuan di Jawa dan Minangkabau. Pada tahun 1918 bagian kewanitaan Sarekat Islam dirintis oleh Siti Fatimah di Garut. Pada 1920 berdiri sebuah perkumpulan di Yogyakarta bernama Wanita Utama. Kemudian berdiri organisasi perempuan sosialis sekitar 1920-an. Tahun 1924 Wanita Katolik didirikan di Yogyakarta. Organisasi ini membuka kursus baca-tulis untuk para buruh perempuan⁶.

Kemerdekaan nasional memberi hak-hak politik dan hukum tertentu pada perempuan Indonesia, namun tidak menghapus struktur patriarki. Perempuan sudah merasa puas apabila kesamaan hak-hak politik telah tercapai. Penghancuran gerakan perempuan radikal masa 1965 menjadi titik penting kemunduran perjuangan perempuan dalam banyak bidang. Kuatnya dominasi negara di masa Orde Baru semakin meminggirkan gerakan perempuan di tepi jurang kehancurannya. Sekitar tahun 1980-an menguat kembali gagasan feminisme di kalangan muda perempuan kota dan terdidik untuk melawan dominasi negara atas perempuan⁷. Sampai akhirnya, era Reformasi mengantarkan kelahiran organisasi perempuan berbasis massa: Koalisi Perempuan Indonesia, dan lembaga negara yang independen: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Gerakan Perempuan dan Lingkungan

Sayangnya, gerakan yang menuju tatanan yang lebih baik ini dalam analisisnya belum mampu melihat penindasan yang didasarkan pada jenis kelamin. Seringkali para pelaku gerakan sosial melihat isu perempuan sebagai isu yang tidak penting dan bukan prioritas.

Dalam gerakan reforma agraria misalnya, perjuangan untuk memperoleh tanah yang mayoritas didominasi laki-laki menjadi fokus utama. Terjadi penolakan untuk membicarakan hak perempuan atas pengelolaan tanah dengan argumentasi bahwa isu perempuan akan dibicarakan ketika tanah sudah menjadi milik mereka.

⁵ <http://e-kalyanamitra.blogspot.com/2007/03/gerakan-perempuan-indonesia-tanya.html> diakses pada tanggal 21 Nopember, 2008.

⁶ ibid

⁷ ibid

Gerakan perempuan memberikan sumbangan penting dalam gerakan sosial di Indonesia. Gerakan ini menawarkan cara pandang baru bagi gerakan sosial. Sumbangan pemikiran untuk melihat sesuatu yang mikro sebagai hal yang patut dicatat sebagai sejarah dimana selama ini mayoritas sejarah hanya dicatat oleh laki-laki. Gerakan perempuan mulai mendobrak hal ini. Hal-hal mikro dan personal yang hanya dapat diceritakan oleh perempuan seharusnya juga dicatat sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah.

Walaupun demikian, gerakan perempuan saat ini misalnya, seringkali terjebak dalam terminologi Kekerasan dalam Rumah Tangga maupun kekerasan terhadap perempuan yang 'kasat' sementara analisis kekerasan secara struktural masih belum banyak digunakan.

Singgungan gerakan perempuan dan gerakan lingkungan dimulai ketika dalam pertemuan Beijing Walhi (sebuah organisasi lingkungan) menghadiri pertemuan tersebut dengan isu tenun ikat yang berasal dari daerah maumere dan sekitarnya di NTT. Pertemuan tersebut kemudian diikuti dengan persiapan penyusunan laporan Beijing +5 khususnya untuk topik perempuan dan lingkungan. Dalam pertemuan Beijing +5 di New York, Indonesia mengirimkan beberapa wakil perempuan dari gerakan lingkungan dan masyarakat adat. Selanjutnya, lahirnya lembaga-lembaga kajian perempuan di tingkat universitas membuka peluang adanya kajian perempuan dan lingkungan, yang salah satunya dipelopori oleh Kajian Wanita UI pada tahun 2000.

Tantangan yang dialami perempuan sebagai pelaku gerakan sosial

Temuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa karena artikulasi dan aktivitas perempuan yang aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia berbeda dengan anggapan dan harapan masyarakat umum tentang posisi dan perilaku perempuan didalam komunitas dan dalam keluarga maka perempuan mengalami berbagai kekerasan dan ancaman yang lebih ketimbang yang dialami pembela HAM yang berjenis kelamin laki-laki.

Komnas Perempuan menemukan selain **sembilan** kerentanan umum, seperti pembunuhan dan kehilangan nyawa, penyiksaan, penganiayaan, pengrusakan properti, kriminalisasi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, intimidasi, penghancuran sumber kehidupan, pembunuhan karakter dan stigmatisasi, ada **sepuluh** kerentanan spesifik yang dialami oleh perempuan pembela HAM. Kekerasan-kekerasan itu adalah pemerkosaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual, stigmatisasi seksual, politisasi identitas



Perempuan Molo: perempuan pembela HAM

perempuan, serangan pada posisi dan peran ibu, istri, dan anak perempuan, pengikisan kredibilitas lewat status perkawinan, pengucilan dan penolakan dan pengerdilan kapasitas serta persoalan perempuan⁸.

⁸ Dewi Yuri dkk., Format Dokumentasi: Pengalaman Kerentanan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM, Komnas Perempuan, 2006.

Pelaku tindak dan ancaman kekerasan ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku kekerasan dan keluarga pelaku kekerasan terhadap korban yang didampingi oleh perempuan pembela HAM; kelompok separatis, kelompok yang bertikai dalam masyarakat, kelompok fundamentalis; kelompok tak dikenal seperti preman; media massa; komunitas; keluarga; lembaga adat dan agama; serta tokoh masyarakat dan politik tetapi juga oleh organisasi tempat perempuan pembela HAM bekerja dan beraktivitas bahkan oleh rekan sekerja dan sesama aktivis.

Selain kekerasan yang dialami, posisi perempuan yang dianggap sebagai warga negara kelas dua mengakibatkan isu-isu yang mereka perjuangkan dianggap sepele dan apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah pekerjaan.

Padahal, mengacu pada resolusi PBB nomor A/RES/53/144 yang dikeluarkan pada 8 Maret 1999, bahwa:

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

Dan yang juga dimaktubkan pada UUD 1945, Pasal 28 C ayat 2:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Maka seharusnya tidak perlu ada penghalang-halangan terhadap perempuan dalam perannya untuk memperjuangkan hak asasi manusia.

Sekalipun seorang perempuan mampu terlibat dalam gerakan-gerakan sosial, namun mereka terpaksa untuk berpola laku sebagai laki-laki. Berdasarkan pengalaman gerakan sosial yang dilakukan perempuan penyadap karet di Brasil pada akhir-akhir tahun 1980an, Jelin (1990b: 186) menjelaskan sebabnya adalah:

Struktur keluarga dan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin telah menghalangi partisipasi publik perempuan karena beban tanggungjawab dan beban ideologi yang dialami karena menjadi perempuan. Nampaknya, karena inilah, maka perempuan lebih terlibat dalam aksi protes pada saat kondisi yang kritis ketimbang terlibat dalam aktivitas organisasi formal dalam jangka waktu panjang yang membutuhkan tanggungjawab, alokasi waktu dan tenaga untuk organisasi dan juga sebagai tandingan terhadap laki-laki...sebagai konsekuensinya, perempuan dapat memasuki ruang publik dengan mengadopsi sistem yang maskulin, berpola laku seperti laki-laki - menuntut kesetaraan - atau mereka dapat mengubah ruang ini dengan memasukkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh jenis kelamin mereka dan beban-beban berat secara historis.

BAB II. RENTANG TITIK KEHANCURAN PEREMPUAN

Titik kehancuran adalah sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan terganggunya atau putusnya sumber-sumber kehidupan perempuan, terutama dari kelas sosial paling rendah. Peristiwa tersebut bisa berulang, berubah bentuk maupun pelaku, dan berbabak-babak.

Temuan kami dalam rentang titik kehancuran perempuan di delapan kelompok kajian sebagai berikut:

1. **Perempuan tani.** Perempuan tani yang menjadi subyek pemetaan kali ini adalah para perempuan tani yang tinggal di Desa Ketajek, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Rentang titik kehancuran sudah terbingkai ketika terjadi konflik pertanahan antara masyarakat dengan PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) pada tahun 1973 hingga sebagian warga ditangkap dan ditahan di Polsek Panti dan sebagian lainnya mengungsi. Akibat yang dirasakan hingga kini adalah hancurnya kondisi sosial-ekonomi; hancurnya sumber kehidupan dan ketahanan pangan sekitar 200 rumah tangga petani, mengakibatkan kelaparan bagi kelompok perempuan dan anak-anak, di mana beban mencari makan keluarga tetap di tangan perempuan.
2. **Perempuan nelayan.** subyek pemetaan ini adalah perempuan nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara yang ruang hidupnya diambil alih oleh Pantai Cermin Theme Park & Resort (PCTPR). Akibatnya pendapatan perempuan nelayan sepanjang pesisir menurun drastis atau hilang sama sekali, memaksa mereka alih profesi tanpa kemampuan yang memadai, bahkan merusak solidaritas sosial perempuan.
3. Untuk **perempuan buruh perkebunan** teh PT. Pagilaran, mengalami rentang titik kehancuran yang berbabak-babak dan panjang, bisa dikatakan sejak perkebunan itu ada. Buruh perkebunan secara turun-temurun tetap menjadi buruh, tanpa jaminan hidup yang jelas dan jauh dari jangkauan perlindungan, lebih mirip perbudakan (*bounded-labour*). Kebanyakan buruh perempuan adalah buruh petik daun teh, yang ditempatkan sebagai buruh harian lepas.

Banyak perempuan buruh perkebunan mendapat upah yang tidak memadai, tidak adanya jaminan kesehatan, ketidakjelasan status, pensiun dan pesangon dimana pensiun dan pesangon tidak dibedakan berdasarkan lamanya masa kerja melainkan dibedakan hanya pada status pekerja apakah pegawai bulanan, karyawan harian tetap dan karyawan harian lepas. Walau diskriminasi upah tidak ada namun pada kenyataannya buruh laki-laki pasti selalu mendapatkan upah lebih banyak karena pembayaran upah terutama pada buruh harian lepas didasarkan pada berat perkilo daun teh yang berhasil dikumpulkan.

Bulan puasa tidak ada pengurangan jam kerja. Upah laki perempuan sama, kalau kuat dapat daun banyak ya duitnya banyak. Sekarang paling dapat daun 15 Kg, kalau yang nggak kuat dapatnya cuma 7 Kg. (Ri, 42 tahun, buruh petik)

4. **Perempuan adat.** Titik kehancuran perempuan adat kasepuhan Banten Kidul dimulai ketika tanah sebagai ruang hidup mereka dikuasai Negara melalui Perhutani dan Taman

Nasional, dan kehadiran penambangan emas yang dikelola BUMN Antam di kawasan ekosistem gunung Halimun. Kondisi ini mendorong perempuan adat di gunung halimun dinikahkan dalam usia muda, dan meningkatnya migrasi ke kota dalam usia muda untuk mencari pekerjaan.

5. **Perempuan Molo** yang tinggal di kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur mengalami titik kehancuran ketika perusahaan tambang hadir dan melakukan eksploitasi tambang marmer atas gunung yang merupakan sumber air bagi masyarakat molo. Membuat rusaknya sumber air dan akses perempuan terhadap air semakin sulit, sehingga menambah beban kerja perempuan secara domestik, maupun ketika bekerja di ladang.
6. Perempuan Dayak Hibun yang terlibat dalam kegiatan perkebunan besar **kelapa sawit** di dusun Sanjan Eras, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Mengalami titik kehancurannya sejak masuknya perkebunan sawit tahun 1985. Mengakibatkan perempuan kehilangan akses dan kontrol atas tanah, menempatkan perempuan sebagai buruh di perkebunan sawit tanpa perlindungan formal, dan adanya perubahan pola konsumsi.

Sebelum masuk perkebunan sawit di Dusun Sanjan Emberas, sungai yang tidak jauh dari rumah mereka (sungai Kria dan sungai Kayu), airnya jernih dan bisa diminum tanpa dimasak, setelah ada aktivitas perkebunan kelapa sawit pada tahun 1985 air sungai mulai menjadi tidak bersih, kemudian sejak tahun 1991 air sungai sudah menjadi sangat kotor dan tercemar yang disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia dan tidak ada lagi tumbuhan lain selain sawit di atasnya, jika diminum membuat perut sakit dan bisa membuat mencret. Ibu S bercerita bahwa orang di kampungnya dulu mengambil air untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk minum dari sungai dekat rumah (sungai Kria) tetapi saat ini mereka mengambil air di sungai yang jauh dari rumah (sungai Muru).

7. **Perempuan korban bencana lumpur** Lapindo di daerah Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi pengungsi bencana ekologis merupakan subyek pemetaan yang mewakili korban bencana ekologis. Titik kehancuran terjadi ketika secara mendadak area perumahan tempat mereka tinggal, juga tempat kerjanya sebagai ruang hidup mereka, terendam lumpur. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk mengungsi, bagi perempuan kondisi di pengungsian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi kesehatan reproduksi mereka, dan terputusnya sumber kehidupannya.
8. **Perempuan kampung kota**, di Kelurahan Kwitang, Jakarta yang hidup di sekitar sungai Ciliwung. Rentang titik kehancuran terpicu karena modernisasi kota lewat program perbaikan kampung dan penataan kota (MHT), penataan sungai (Prokasih), dan dilanjutkan dengan program penurunan bantaran sungai. Kondisi di atas ternyata

membuat perempuan terputus relasinya dengan sungai, sehingga merubah persepsi dan perilaku mereka yang semula memelihara sungai, menjadi membuang sampah ke sungai. Apalagi, mereka melihat sampah-sampah di sungai berasal dari industri atau Rumah Sakit yang membuang sampah atau limbahnya ke sungai.



Kondisi sungai Ciliwung yang kritis

“Enak waktu kali Ciliwung masih bisa dipake, kita semuanya nyuci, mandi di kali. Waktu belum ada MCK dan air pompa untuk air minum kita beli, sepikulnya 1000 rupiah. Sampah dari dulu udah ada di kali tapi tidak sebanyak sekarang, waktu masih pakai getek airnya lancar. Jam 6-7 pagi kali rame, karena semuanya pada nyuci dan mandi di kali”. “Lama sekali masyarakat di Kwitang biasa mencuci ramai-ramai di kali, yaitu memanfaatkan air Ciliwung yang melewati Kwitang.

BAB III. IDENTIFIKASI KEKERASAN

1. Perempuan sebagai properti

Kondisi ini menempatkan perempuan tidak dalam posisi yang penuh untuk mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri. Dan memberi beban kelangsungan hidup keluarga kepada perempuan, tanpa persetujuan (*consent*) penuh dari perempuan itu.

Variasi beban dapat bermacam-macam, seperti memakai tenaga perempuan tanpa batas. Termasuk dalam kategori ini adalah memperkerjakan perempuan untuk mengurus keluarganya, baik ketika masih dalam keluarga besarnya, maupun ketika telah menikah, maka ia tidak saja mengurus keluarga batihnya, tetapi keluarga besar suaminya. Atau, perempuan bekerja di luar keluarganya, mencari nafkah ke kota terdekat, atau bahkan menjadi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, di mana hampir seluruh penghasilannya akan dikirim ke keluarganya di kampung.

Dalam kondisi lain, perempuan dipaksa untuk menikah dalam usia dini, dengan tujuan mengurangi beban keluarga. Dalam berbagai kasus, sering ditemui perempuan menikah berkali-kali, tanpa surat resmi, atau menikah dalam jangka waktu tertentu, sembari menanti suaminya yang bekerja di tempat lain. Perempuan kasepuhan bersaksi:

... ngaranna susah iyeh teu kaparaban, sugan aya-aya nu maraban ceuk ibu tea sugan saurang kitu. kolot mah tuh susaheun
(orang tua saya menikahkan saya dengan harapan bisa lebih enak, ada orang (suami) yang kasih makan kepada saya (R)).

Hanya 3 bulan setelah lulus sekolah dasar, saya (\pm 12 tahun) dinikahkan dengan laki-laki yang saya kenal. Saat itu wali nikah saya adalah ayah saya sendiri, dan proses pernikahannya saya tidak tahu. Yang saya tahu saat itu ada laki-laki itu di rumah saya, dan orang tua saya bilang "itulah suami kamu!". Saat itu perasaan saya tidak menentu. Saya suka sama suami saya, dia sudah menikah yang ke-4 kalinya dengan saya, tapi saya tidak mau tidur bareng suami saya. Kadang-kadang saya tinggal di rumah mertua saya, dan berusaha terlihat rukun bersama suami saya dimata mereka. Setiap kali suami meminta menggauli, saya lari lewat jendela tanpa diketahui oleh mertua saya, dan pagi harinya pasti bertengkar. Setelah 3 bulan menikah, kami bercerai karena dianggap tidak patuh sama suami.

Jikapun, perempuan memiliki akses yang setara atas pekerjaan, namun kontrol mereka atas penghasilannya pun terbatas, atau sebenarnya tidak ada sama sekali. Kondisi ini dapat terlihat dalam kasus perempuan di perkebunan sawit sebagai berikut:

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengerjakan sawit, namun karena pada tahap memanen dan mengangkut untuk dijual adalah para suami sehingga upah diterima oleh suami. Suami yang mengerti akan kedudukannya dalam rumah tangga menyerahkan uang untuk dipegang istrinya tetapi bagi para suami yang tidak mengerti uang hasil upah mengerjakan sawit digunakan sendiri salah satunya dihabiskan ke kafe. Para suami juga kerap berbohong tentang jumlah upah yang diterima, si istri tidak bisa tahu pasti berapa upah yang diterima karena jumlahnya memang tidak tetap.

“Kalau yang manen itu bapak, yang angkut juga bapak dan terima gaji bapak, kadang manen nyuruh orang, waktu gaji itulah kadang di bilangny tekor dengan istrinya di rumah maklumlah zaman sekarang, barang seperti itu pun bisa selingkuh. Apa ndak selingkuhkan, gaji kamu misalnya satu juta ketika di tanya sama bapak berapa gaji mu yong ah limaratus jak katanya, padahal satu juta gajinya, nah uang lima ratus itu untuk berpoya-poya. Karena terima gaji tidak tetap”

2. Alat pelanggeng reproduksi sosial

Ketika perempuan keluar dari wilayah hidupnya untuk bekerja (seperti ditemui di perempuan petani dan perempuan adat), sebagian besar pendapatannya adalah untuk kehidupan keluarganya. Di perempuan petani, uang kiriman tersebut ditabung sedikit demi sedikit untuk membeli lahan sebagai asset sosial. Di perempuan kasepuhan, hasil pendapatan mereka juga untuk mendukung pelanggeng sistem adat. Namun demikian, walaupun mereka berkontribusi dalam penghidupan keluarga dan atau kampungnya, tetapi mereka tidak memiliki akses, kontrol dan kedaulatan terhadap komunitasnya. Karena, sekali lagi, keputusan-keputusan atas penggunaan lahan, maupun adat tidak ada di tangan mereka, tetapi tetap di elit kelompok masyarakatnya.

3. Pengabaian perempuan berbasis kelas

Perempuan tidaklah homogen, didalamnya terdapat kelas-kelas. Perempuan berpendidikan tinggi dengan mereka yang berpendidikan lebih rendah, perempuan dari kelompok bangsawan dengan mereka yang dari kelompok rakyat biasa, perempuan dewasa dengan mereka yang lebih muda. Strata ini yang seringkali luput dari perhatian ketika melihat kondisi perempuan.

Dalam hampir semua keputusan, baik di tingkat komunitas, keluarga, maupun keputusan terhadap dirinya, tidaklah pernah menjangkau perempuan -terutama perempuan dari kelompok sosial paling rendah.

4. Intervensi kapital/pasar

Intervensi kapital/pasar terlihat di semua subyek pemetaan, **Perempuan tani** desa Ketajek yang mengalami rangkaian kekerasan karena konflik dengan pihak perkebunan, dalam sengketa lahan.

*Ditari eman endi omah/lemah po nyowone. Byuh...rasane. Sedanten dirubuhaken.
Pas dugi montor sing enten rantene niku teng no 12 niku, keweden. Dadi gih pun
disade mawon griyo niku. Sak pajeng-pajenge*

Perempuan nelayan Desa Pantai Cermin, kehilangan akses ke pesisir ketika diambil Pantai Cermin Theme Park & Resort (PCTPR), **perempuan buruh perkebunan teh PT. Pagilaran**, yang untuk mempertahankan hidupnya tetap menerima kondisi sebagai buruh seumur hidupnya, bahkan turun temurun; **Perempuan adat** Kasepuhan Banten Kidul yang semakin sempit ruang hidupnya karena lahannya menjadi pokok sengketa dengan Perhutani, dan kemudian kehadiran Taman Nasional. **Perempuan sawit** yang kebanyakan beretnis Dayak Hibun di Kalimantan Barat, mengalami penurunan drastis ketika perkebunan besar kelapa sawit mengambil alih lahan dan mencemari sumber air di sana. **Perempuan Molo** di Timor Tengah Selatan, yang ruang hidupnya, lahan dan sumber air, terganggu karena masuknya investasi tambang batu marmer.

*‘Mereka omong kosong mau ambil air buat kantor kecamatan, tahunya mereka
ambil air untuk bikin bak mau tambang batu. Kita waktu itu bilang, kalau mau
bikin air kenapa tidak kasih turun air dengan selang dengan pipa? Waktu itu*

mereka bilang di kantor kecamatan tidak ada air. Jangan bikin kami seperti orang bodoh, kami buta huruf tapi kami tidak bodoh'. (EA)

Sementara, **Perempuan korban bencana Lapindo** di daerah Sidoarjo, Jawa Timur tercerabut sumber-sumber kehidupannya ketika eksploitasi tambang migas terjadi di daerah itu. Untuk **perempuan kampung kota**, di daerah kwitang, Jakarta mengalami marjinalisasi ketika program perbaikan kota dan penurapan bantaran sungai malah memisahkan perempuan terhadap sumber airnya.

Intervensi pasar, telah merubah pola konsumsi perempuan di dalam pemenuhan pangan keluarganya. Misalnya yang terjadi pada perempuan kampung kota, yang banyak mengkonsumsi mie instan untuk makan keluarganya karena harganya yang murah. Tidaklah mengherankan, jika kemudian



Pos Pengungsian korban lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong, Jawa Timur

sampah kemasan mie instan merupakan jenis sampah yang banyak ditemui di sungai.

Intervensi pasar juga telah merubah persepsi perempuan terhadap tubuh. Mempunyai kulit berwarna putih menjadi sesuatu yang penting (walaupun fenomena ini tidak ditemui di perempuan molo, maupun perempuan petani). Sehingga, ditengah alokasi memenuhi kebutuhan akan pangan, perempuan mengalokasikan sejumlah uang untuk kosmetik.

Namun keterbatasan pengetahuan dan keuangan menyebabkan mereka tidak memiliki banyak pengetahuan apakah kosmetika yang mereka gunakan itu aman bagi mereka.

5. Mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan/ kedaulatan pangan

Perempuan menjalankan fungsi mengumpulkan makanan (*food gathering*) untuk kepentingan keluarganya. Di Kasepuhan, perempuan yang menyimpan bibit padi di lumbung dekat rumahnya. Di Molo, pengelola rumah bulat (rumah penyimpanan makanan) adalah perempuan. Di perempuan kampung-kota mereka berusaha dengan membuka warung kecil-kecilan. Namun, peran mereka di bidang pemenuhan pangan keluarga tidak mendapat penghargaan yang layak, masih dianggap hal yang remeh. Di perempuan tani, mereka berusaha mencari bahan pangan apa saja yang bisa dimakan meskipun gatal bahkan kadang beracun hanya sekedar untuk mengisi perutnya dan perut anak-anaknya yang kelaparan.

“Namanya dagang susah senangnya ada aja, Mak selalu menikmati semuanya. Masa-masa sulit waktu tahun 2000, bener-bener gak ada pembeli, mungkin karena krisis kali ya? Sedih sekali, Kalau gak cukup terpaksa hutang dan jual barang. Sampai dengan tahun 2006 kondisi tidak berubah, sulit sekali, warga gak ada yang bisa beli sementara belanja barang juga mahal. Kalau belanja 50.000 dapatnya hanya 20.000 atau 25.000, tapi Mak mencoba bertahan”

BAB IV. POLA SURVIVAL KHAS PEREMPUAN

1. Menikah dan Kontrasepsi

Menikah adalah pilihan yang ditempuh untuk bertahan hidup. Untuk itu, mereka rela menikah berkali-kali, atau menjadi isteri kedua dan seterusnya dari suaminya. Biasanya mereka dinikahkan di depan penghulu, namun kebanyakan tidak memiliki surat nikah atau dicatatkan dalam catatan sipil. Penggunaan kontrasepsi digunakan oleh perempuan sebagai bagian dari daya bertahan hidup perempuan, baik untuk melindungi diri dari suaminya seperti yang dialami oleh perempuan adat di Kesepuhan, atau untuk mengurangi beban ekonomi keluarga seperti yang dialami oleh perempuan kampung kota.

2. Pergundikan

Hal yang membedakan pergundikan dengan menikah adalah dalam prosesnya, jika menikah dilakukan dan diketahui masyarakat. Pergundikan atau Pernyaian adalah lembaga perkawinan tanpa pengesahan dari negara maupun agama. Lembaga perkawinan ini terjadi karena pihak pria dalam posisi sosial-ekonomi yang lebih tinggi ketimbang pihak perempuan, dan mengikat perempuan seperti propertinya. Di jaman kolonial Belanda, praktek pernyaian banyak dilakukan terhadap perempuan pribumi dan untuk selanjutnya praktek-praktek pernyaian terus ada dalam kehidupan modern saat ini.

3. Berhutang dan menjual barang

Berhutang dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perempuan nelayanlah yang kesana-kemari mencari hutang, jika suaminya tidak menghasilkan ikan yang cukup untuk dijual, termasuk berhutang untuk mendukung alat produksi, seperti membeli jala atau kebutuhan transpor. Perempuan perkebunan biasa berhutang beras ke warung terdekat untuk makannya. Selain berhutang ke warung-warung kecil, perempuan di kampung kota juga menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya.



Perempuan Buruh Perkebunan Sawit

4. Alih Profesi

Kegiatan apa saja akan dilakukan perempuan untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Perempuan nelayan yang masih memiliki sedikit modal menjadi pedagang keliling, yang tidak memiliki modal bekerja sebagai penawar makanan di warung-warung, perempuan sawit yang tidak memiliki lahan menjadi pemetik brondol sawit, sementara perempuan petani bekerja sebagai buruh atau menumpang di ladang atas seijin pemilik ladang.

Kulo niki, saking gusuran pindah teng gunung buthak. Tumut lik'e. trus teng persil, bande alit. Gih njombret, miwil kopi, macul gawe juglangan niko, bayarane mboten sesuai. Dadi bayaran setengah ulan niko, dipangan mboten cukup.

5. Alih Konsumsi

Kesulitan mendapat bahan pangan, membuat perempuan mengkonsumsi apa saja yang bisa ditemui untuk memenuhi rasa laparnya. Perempuan adat dan perempuan tani bersaksi:

*teu boga lahan, heueuh alit heueuh ..., dahar ge kadang-kadang teu manggih kadang kadang manggih kitu beulieun teu aya jauh ayana kiyeu bae daharan leuweung leuweung paku didahar paku leuweung, bubuay eta pake sangu buahna tea heueuh **bubuay** eta ...* Dulu saya hidup susah, tidak punya lahan, tidak punya leuit (tanah), cari kerja apa saja. Ngahuma (berladang) dilahan kahutanan, tapi nggak hasil karena tanahnya jelek. Disini dulu hutan, saya suka ambil rotan. Kadang-kadang tidak ketemu makan, lalu saya makan pakis dan bubuay (buah dari pohon sejenis beringin).

6. Spiritual (adat, berdo'a, pasrah)

Kekuatan adat yang menyatukan masyarakat Molo untuk berjuang mengusir investor. Demikian juga do'a adalah cara yang dipilih untuk menyemangati hidup mereka. Sementara bertentangan dengan pandangan umum, sikap pasrah adalah jalan akhir yang ditempuh perempuan ketika mereka telah mengusahakan berbagi jalan untuk keberlangsungan hidup (*survival*) dirinya dan keluarganya.

Temuan Umum

Kelangkaan (*scarcity*) dalam daya dukung alam, yang dikeruk tanpa mempertimbangkan kerentanan dan keberlanjutan lingkungan, **yang terjadi karena intervensi negara/kapital yang menyebabkan konflik di tingkat masyarakat dan pengabaian pengalaman perempuan maupun keberadaan perempuan sebagai subyek atau agen keberlangsungan reproduksi sosial** menempatkan perempuan dalam kondisi terpuruk, terpinggirkan, dan terabaikan.

BAB V. TAWARAN-TAWARAN DIALOG

1. Mengkaji ulang pola relasi

Mengkaji ulang gerakan baik gerakan perempuan, gerakan lingkungan, gerakan agraria, dan gerakan masyarakat adat untuk melihat lebih dalam mengenai fakta kekerasan kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, pengabaian, peminggiran, dan pengucilan yang dialami perempuan terutama perempuan dari kelas sosial paling bawah. Termasuk pilihan-pilihan mereka untuk mempertahankan hidupnya.

Selama ini kita menganggap pelaku kekerasan (opresi) adalah negara, atau kapital atau kombinasi keduanya. Namun pada faktanya tidak demikian, karena pelaku juga bisa ada di tingkat masyarakat, maupun dari kelompok pendamping maupun penggerak masyarakat.

2. Gerakan perempuan mulai menggunakan perspektif yang lebih luas dengan menganalisa permasalahan secara struktural.
3. Gerakan sosial merefleksikan dan membuka ruang dialog untuk mengkomunikasikan dan mensinergikan gerakan sehingga isu-isu dan kepentingan perempuan terakomodasi dengan setara, bukan sekedar tempelan.
4. Negara dalam merumuskan kebijakan lebih melibatkan perempuan tidak hanya dalam pemenuhan kuantitas atas kuota tetapi memberikan kesempatan/ruang kepada perempuan untuk bersuara.

Filename: Sebuah Tawaran Dialog-Ana
Directory: F:
Template: C:\Documents and Settings\User\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title:
Subject:
Author: User
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/3/2008 5:29:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 12/3/2008 5:29:00 PM
Last Saved By: User
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 12/3/2008 5:30:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 19
Number of Words: 6,657 (approx.)
Number of Characters: 37,948 (approx.)